



**ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP
KELUARNYA PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 56 TAHUN 2014 DENGAN TINGKAT KESIAPAN
PENGELOLA PASRAMAN, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH**

OLEH

Dr. I Nyoman Yoga Segara, M.Hum

I Ketut Budiawan, MH., M.Fil.H

I Putu Jaya Widhita, S.Pd.H., MM.

Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam
Seminar Hasil Penelitian di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Hindu se
Indonesia, Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2015

**SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU (STAH)
DHARMA NUSANTARA JAKARTA
TAHUN 2015**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340

Telepon/Faximile : (021) 3811504 3521324, 3811227, 3521326, 3812232

SITUS <https://bimashindu.kemenag.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.1471 /DJ.VI/Dt.VI.II.3/PP.00.9/05/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Santika, S.Sos., M.Si.
NIP : 19661231 198503 1 003
Jabatan : Kasubdit Pendidikan Tinggi, Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama RI

dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul: **“Analisis Hubungan Persepsi Terhadap Keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 dengan Tingkat Kesiapan Pengelola Pasraman, Masyarakat, dan Pemerintah”** yang disusun oleh **Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum, I Ketut Budiawan, MH., M.Fil.H, I Putu Jaya Widhita, S.Pd.H., MM.**, memang benar dilaksanakan atas biaya DIPA Ditjen Bimas Hindu Tahun 2015, dan telah dipublikasikan dalam Seminar Hasil Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Hindu se Indonesia di Denpasar, Bali Tahun 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Mei 2017
Kasubdit Pendidikan Tinggi

I MADE SANTIKA



Tembusan:

1. Dirjen Bimas Hindu;
2. Direktur Pendidikan Hindu.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Identifikasi Masalah	4
	1.3 Batasan Masalah	6
	1.4 Rumusan Masalah	6
	1.5 Tujuan Penelitian	7
	1.6 Manfaat Penelitian	8
	1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN LANDASAN TEORI	
	2.1 Tinjauan Pustaka	10
	2.2 Kerangka Konseptual	13
	2.3 Landasan Teori	14
BAB III	MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS	
	3.1 Model Penelitian	24
	3.2 Hipotesis	25
BAB IV	METODE PENELITIAN	
	4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
	4.2 Populasi dan Sample	26
	4.3 Jenis dan Sumber Data	27
	4.4 Teknik Pengumpulan Data	27
	4.4 Metode Analisis Data	34
	4.5 Teknik Penyajian Hasil Penelitian	32
BAB V	ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP KELUARNYA PMA 56 TAHUN 2014 DENGAN TINGKAT KESIAPAN PENGELOLA PASRAMAN, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH	
	5.1 Gambaran Umum dan Latar Penelitian	
	5.2 Hubungan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi;	
	5.3 Hubungan antara persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi;	
	5.4 Hubungan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi	
BAB VI	PENUTUP	
	6.1 Simpulan	
	6.2 Rekomendasi	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah proses budaya untuk melakukan perubahan dan meningkatkan harkat serta martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan juga memiliki peran untuk menjadikan manusia yang lebih baik dan berkarakter, sehingga pendidikan dinilai sangat potensial dalam pembangunan manusia seutuhnya dan merupakan investasi kemanusiaan jangka panjang yang patut diperhatikan.

Dalam Bhagawad Gita (2006:257) dijelaskan bahwa orang yang mempersembahkan kemampuan pengetahuannya memiliki nilai yang sangat utama dalam sebuah yajna seperti yang dijelaskan dalam Bhagawad Gita IV. 33:

*śreyān dravya-mayād yajñāj
jnāna-yajnah parantapa
sarvam karmākhilam partha
jnāne parisamāpyate*

Terjemahan:

Wahai penakluk musuh , korban suci yang dilakukan dengan pengetahuan lebih baik dari pada hanya mengorbankan harta benda material. Wahai putera Prtha (Arjuna), bagaimanapun maka korban suci yang terdiri dari segala kegiatan kerja memuncak dalam pengetahuan rohani.

Dari uraian sloka tersebut dapat dipahami bahwa beryajna dengan Jnana memiliki keutamaan, karena, segala karma tanpa kecuali puncaknya adalah pengetahuan itu sendiri untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berbudi luhur sehingga menjadi generasi yang bijaksana dalam menyikapi segala hal dalam kehidupan ini.

Tanggungjawab pendidikan untuk melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan berbudi luhur juga menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa. Dalam hal ini masyarakat Hindu memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan Keagamaan Hindu melalui pasraman formal

yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kesembilan Pasal 30.

Hal yang sama mengenai pendidikan agama tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 (PP 55 Tahun 2007), yang menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan proses pendidikan dan memberikan pengetahuan, membentuk kepribadian, sikap, serta keterampilan para siswa dalam mengamalkan norma, nilai, serta ajaran agamanya dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa; Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Sedangkan tujuan pendidikan agama untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Berkaitan dengan proses pendidikan untuk membentuk karakter generasi anak bangsa upaya pemerintah melalui Kurikulum 2013 lebih menekankan bahwa hasil belajar siswa tidak hanya berwujud pengetahuan semata, tetapi juga penanaman sikap-sikap positif baik sikap spiritual maupun sikap sosial terhadap anak, sehingga kelak nantinya dia akan tumbuh menjadi manusia cerdas dan berbudi pekerti, yang memiliki karakter baik dan positif yang diharapkan akan berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya pada khususnya dan negara pada umumnya.

Umat Hindu sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam melakukan perubahan melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur melalui pendidikan keagamaan. Pendidikan Keagamaan Hindu seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 (PMA 56 Tahun 2014) wajib untuk diimplementasikan.

Lahirnya PMA 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu akan memberikan persepsi tersendiri pada masyarakat sebagai pengguna, pengelola pasraman sebagai pelaku dan juga pengelola kebijakan pemerintah di daerah sebagai regulator, yang kesemua unsur tersebut memiliki peran masing-masing. Dilain sisi tingkat kesiapan juga merupakan hal yang sangat penting sehingga kita perlu mengetahui seperti apa tingkat kesiapan semua pihak dalam mengimplementasikan PMA 56 Tahun 2014.

Beberapa pihak memiliki peran vital dalam keterlibatannya untuk mengimplementasikan PMA 56 Tahun 2014 ini. Pihak yang paling berkepentingan adalah Pengelola Pasraman, Masyarakat, dan Pemerintah. Dari ketiga pihak tersebut penting untuk diketahui bagaimana persepsi mereka terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014, serta bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi terhadap tingkat kesiapan tersebut. Dari pengalaman yang sudah ada, ada yang hal-hal yang perlu menjadi perhatian agar masing-masing pihak mempunyai tingkat kesiapan yang tinggi dalam mengimplementasikan PMA 56 Tahun 2014.

Hal-hal tersebut dinilai mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesiapan tersebut, dan perlu diketahui bagaimana signifikansi besar pengaruh tersebut sehingga semua pihak dapat menempatkan prioritas mana yang didahulukan dalam melakukan persiapan implementasi PMA 56 Tahun 2014. Untuk kelompok Pengelola Pasraman faktor-faktor tersebut adalah dukungan jumlah SDM tenaga pengajar yang tersedia, jumlah peserta didik yang belajar di Pasraman, jumlah tingkatan kelas yang disediakan, kurikulum yang diajarkan, status Pasraman, dan jumlah pihak/lembaga lain yang dilibatkan. Untuk Kelompok Masyarakat, faktor-faktor tersebut adalah minat masyarakat terhadap keberadaan Pasraman Formal, potensi dukungan lingkungan sekitar, dan potensi persaingan dengan sekolah umum lain yang sudah ada. Sedangkan untuk Kelompok Pemerintah, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah dukungan jumlah SDM tenaga di masing-masing Satker Bimas Hindu, jumlah anggaran yang tersedia untuk pendidikan program Bimas Hindu, dukungan peraturan daerah atau kebijakan yang berlaku di daerah di mana Satker Bimas Hindu berada, dukungan sarana prasarana dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah setempat, potensi dukungan lembaga atau organisasi Hindu, dan potensi dukungan politis, sosial, dan budaya dari pemerintah daerah setempat.

Berbagai permasalahan tersebut di atas sampai saat ini juga belum ada yang mengkajinya secara serius dan mendalam untuk meneliti sehingga dapat dikatakan penelitian ini menjadi yang pertama pasca keluarnya PMA 56 Tahun 2014. Berdasarkan fakta ini, posisi penelitian ini merupakan kebutuhan yang mendesak, terlebih Ditjen Bimas Hindu memiliki keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan regulasi dengan mendirikan pasraman-pasraman formal. Pengambilan kebijakan ini haruslah berbasis penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan atau rekomendasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan lembaga sebagaimana yang diinginkan melalui program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Hindu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pula, STAH DN Jakarta melalui para dosen yang terhimpun ke dalam Kelompok Peneliti sangat tertarik untuk menelitinya dengan judul “Analisis Hubungan Persepsi dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kesiapan Pengelola Pasraman, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014”. Fokus dari karya ilmiah ini adalah mengetahui persepsi tentang tingkat kesiapan semua *user* dan *stakeholder*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada sejumlah masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

- 1.2.1 PMA 56 Tahun 2014 belum diturunkan menjadi juklak dan juknis;
- 1.2.2 PMA 56 Tahun 2014 belum disosialisasikan ke seluruh stakeholder;
- 1.2.3 Persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 belum diketahui;
- 1.2.4 Persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 belum diketahui;
- 1.2.5 Persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 belum diketahui;
- 1.2.6 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan dukungan jumlah SDM tenaga pengajar yang tersedia;

- 1.2.7 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan jumlah peserta didik yang belajar di Pasraman;
- 1.2.8 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan jumlah tingkatan kelas yang disediakan;
- 1.2.9 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan kurikulum yang diajarkan;
- 1.2.10 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan status Pasraman;
- 1.2.11 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan jumlah pihak/lembaga lain yang dilibatkan;
- 1.2.12 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan minat Masyarakat terhadap keberadaan Pasraman Formal;
- 1.2.13 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan potensi dukungan lingkungan sekitar;
- 1.2.14 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan potensi persaingan dengan sekolah umum lain yang sudah ada;
- 1.2.15 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan dukungan jumlah SDM tenaga di masing-masing Satker Bimas Hindu;
- 1.2.16 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk pendidikan program Bimas Hindu;
- 1.2.17 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014

dengan dukungan peraturan daerah atau kebijakan yang berlaku di daerah di mana Satker Bimas Hindu berada;

- 1.2.18 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah setempat;
- 1.2.19 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan potensi dukungan lembaga atau organisasi Hindu;
- 1.2.20 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan potensi dukungan politis, sosial, dan budaya dari pemerintah daerah setempat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini akan membatasinya pada satu masalah pokok, dan masalah pokok ini akan menjadi hipotesis, yaitu tentang hubungan persepsi terhadap keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan tingkat kesiapan masyarakat, pengelola pasraman dan pemerintah di provinsi seluruh Indonesia. Adapun provinsi yang dipilih antara lain Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta dan Banten.

Ketujuh provinsi yang disebut pertama dipilih berdasarkan proporsi umat Hindu (Badan Pusat Statistik, 2010), jumlah pasraman dan struktur organisasi pemerintahan. Sedangkan ditambahkan Provinsi DKI Jakarta dan Banten, peneliti anggap merupakan dua provinsi yang menjadi barometer perkembangan umat Hindu di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat diangkat beberapa masalah antara lain :

- 1.4.1 Bagaimana hubungan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor

yang mempengaruhi?

- 1.4.2 Bagaimana hubungan antara persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi?
- 1.4.3 Bagaimana hubungan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka setiap proses kegiatan yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis hubungan antara persepsi pengelola pasraman, masyarakat, dan masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

1.5.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang :

- a. Hubungan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi;
- b. Hubungan antara persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi;
- c. Hubungan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep operasional dan naskah akademik yang sangat penting bagi peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dibidang pendidikan agama Hindu, serta menjadi referensi untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara signifikan bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, pengelola pasraman dan pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bimas Hindu dalam menjalankan PMA 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan praktis dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Rumusan Masalah
- 1.5 Tujuan Penelitian
- 1.6 Manfaat Penelitian
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN LANDASAN TEORI

- 2.1 Tinjaun Pustaka
- 2.2 Kerangka Konseptual
- 2.3 Landasan Teori

BAB III MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS

- 3.1 Model Penelitian
- 3.2 Hipotesis

BAB IV METODE PENELITIAN

- 4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
- 4.2 Populasi dan Sample
- 4.3 Jenis dan Sumber Data

4.4 Teknik Pengumpulan Data

4.4 Metode Analisis Data

4.5 Teknik Penyajian Hasil Penelitian

BAB V ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KESIAPAN PENGELOLA PASRAMAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 56 TAHUN 2014

5.1 Gambaran Umum dan Latar Penelitian

5.2 Hubungan antara persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi;

5.3 Hubungan antara persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi;

5.4 Hubungan antara persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

6.2 Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk mengetahui perbandingan dan acuan yang akan dipakai dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian yaitu teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan, dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain.

Adapun penelitian atau kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk mengetahui posisi penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hetti Herlina dari Universitas Negeri Padang tahun 2013 yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi Pp 71 Tahun 2010 (Studi Empiris Pada Kabupaten Nias Selatan)*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintahan daerah Kab. Nias Selatan dalam implementasi PP 71 tahun 2010. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan studi kasus, hasil analisis data menunjukkan bahwa kesiapan Pemda Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dalam implementasi PP 71 tahun 2010, dan (2) Saran untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Santi Sani dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2012 yang berjudul “*Kajian Terhadap Kesiapan Pelaksanaan E-Procurement di Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010*”. Penelitian tersebut dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan

keseluruh Instansi Pemerintahan Daerah yang melakukan kegiatan lelang di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 18 Instansi. Kuesioner disebar masing-masing instansi sebanyak 2 (dua) eksemplar yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang. Jumlah kuesioner yang disebar adalah 36 eksemplar. Enam kuesioner tidak kembali, jadi jumlah kuesioner yang terkumpul sebanyak 30 eksemplar. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan persentase, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai simpangan baku. Analisis yang digunakan adalah analisis pemeringkatan nilai rata-rata dan analisis korelasi Pearson. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan telah menerapkan sistem *e-procurement* dalam pelaksanaan lelang namun dari 15 instansi hanya 5 instansi yang sudah siap dalam pelaksanaan *e-procurement*. Hal ini dikarenakan kurangnya pengadaan sarana dan prasarana yang dapat melaksanakan seluruh kegiatan pelelangan yang ada dengan menggunakan metode *e-procurement*. Hasil analisis Korelasi Pearson menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kesiapan dengan tingkat kesulitan pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Helminaria Hutabarat dari Universitas Indonesia tahun 1993 yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesiapan Mengajar Mahasiswa Pendidikan Ahli Madya Keperawatan (Suatu Studi Di PAM Keperawatan Program Keguruan DepKes Di Jakarta Dan Surabaya)*”. Masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah masalah guru yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Menurutny hal tersebut merupakan prediktor kekurangan mampuan guru melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar. Sehingga masalah dalam penelitiannya adalah belum diketahui tingkat kesiapan mengajar mahasiswa Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Program Keguruan. Ruang lingkup penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang kemungkinan mempengaruhi kesiapan mengajar yaitu minat terhadap jabatan guru, motivasi belajar, persepsi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan nilai tes masuk di PAM Keperawatan Program Keguruan. Rancangan penelitian ini adalah studi analitik survey dengan pendekatan *cross sectional*. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi ganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa: (1) Ada hubungan yang bermakna antara minat terhadap jabatan guru dengan Tingkat Kesiapan Mengajar; (2) Ada hubungan yang bermakna antara motivasi belajar dengan Tingkat Kesiapan Mengajar; (3) Tidak

ada hubungan antara Tingkat Kesiapan Mengajar; (4) Tidak ada hubungan antara nilai tes masuk dengan Tingkat Kesiapan Mengajar, dan (5) Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat hubungan yang bermakna antara minat terhadap jabatan guru, motivasi belajar, persepsi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dan nilai tes masuk dengan Tingkat Kesiapan Mengajar.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Indartik, Deden Djaenudin & Kirsfianti L. Ginoga dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan tahun 2010 yang berjudul “*Tingkat Kesiapan Implementasi Redd di Indonesia Berdasarkan Persepsi Para Pihak: Studi Kasus Riau*”. Dalam penelitiannya tersebut penulis menyampaikan bahwa pengetahuan tentang kesiapan para pihak yang ingin berpartisipasi dalam implementasi mekanisme REDD penting untuk mengetahui kebijakan atau perangkat teknis apa yang diperlukan selama mekanisme REDD ini masih belum menjadi kesepakatan yang mengikat. Menurutny sampai sejauh ini informasi tentang kesiapan para pihak dalam implementasi REDD, terutama untuk tingkat lokal (provinsi dan kabupaten) sangat terbatas. Tujuan tulisannya tersebut adalah: (1) mengidentifikasi para pihak yang terlibat; dan (2) mengkaji tingkat kesiapan kelembagaan dan teknis untuk implementasi REDD berdasarkan persepsi para pihak. Penelitian dilakukan di Propinsi Riau pada tahun 2008, karena propinsi ini merupakan salah satu propinsi yang secara historis mempunyai laju deforestasi di dalam kawasan hutan yang tinggi sebesar 157.688,6 ha/tahun pada periode tahun 2003-2006. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan narasumber yang mencakup, perusahaan, akademisi, pengambil kebijakan dan masyarakat. Sampel ditentukan dengan menggunakan pendekatan snowball, dimana sampel berikutnya dinominasikan oleh sampel sebelumnya sampai didapatkan informasi yang relative sama. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis para pihak dan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Menurut penulis pihak-pihak yang harus terlibat dalam kegiatan REDD adalah Kementerian Kehutanan dengan porsi tugas terbesar mulai dari persiapan, implementasi, monitoring dan verifikasi, kemudian secara berurutan Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten, Kementerian Lingkungan Hidup, HPH/HTI, lembaga internasional, LSM, Departemen Luar Negeri, Bapedalda, LIPI, Departemen Keuangan, UPT/UPTD serta masyarakat; (2) Dalam implementasi REDD, aspek yang perlu disiapkan adalah aspek teknologi dan aspek sosial

ekonomi; dan (3) Untuk aspek institusi yang perlu disiapkan adalah ketersediaan peraturan perundangan tentang pembalakan liar, kesadaran untuk mencegah pembalakan liar, dan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan pembalakan liar; (4) Dalam aspek infrastruktur teknis, monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundangan perlu ditingkatkan begitu juga dengan kelengkapan dan keakuratan citra satelit serta database data dasar.

Empat penelitian di atas cukup memberikan inspirasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini karena sebuah produk hukum dan atau regulasi seperti PMA 56 Tahun 2014, terlebih baru diterbitkan mengandung sejumlah masalah, bukan saja karena belum dapat diimplementasikan tetapi juga diperlukan pengujian awal atau evaluasi apakah pengguna baik *user* maupun *stakeholder* sudah memiliki persepsi tentang kesiapannya untuk menerapkan di masing-masing pasraman. Penelitian-penelitian terdahulu meskipun bukan penelitian agama atau dengan substansi pasraman, tetap menyumbang besar baik secara teoritik maupun metodologis. Dari apa yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dan berbeda. Jika keempat penelitian sebelumnya meneliti regulasi yang sudah dan sedang diimplementasikan, maka penelitian ini lebih mendalami apakah para pemangku kepentingan telah memiliki persepsi tentang kesiapan mereka, sehingga hasil penelitian ini berdaya guna secara langsung kepada negara, dalam hal ini secara khusus kepada Ditjen Bimas Hindu. Posisi penelitian ini semakin kuat karena sampai saat ini penelitian seperti ini dengan substansi pasraman belum ada yang menelitinya.

2.2 Kerangka Konseptual

2.1 Tingkat Kesiapan

Tingkat kesiapan adalah suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan dalam mempersiapkan diri baik secara mental, fisik, maupun materi selama melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

2.2 Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Hindu yang isinya mengatur jalur pendidikan formal dan nonformal dalam wadah Pasraman.

2.3 Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Hindu yang berada di wilayah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta dan Banten.

2.4 Pengelola Pasraman

Pengelola Pasraman adalah orang yang terlibat langsung dalam proses kegiatan operasional secara struktural di pasraman yang berada di wilayah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta dan Banten

2.5 Pemerintah

Pemerintah dalam penelitian ini merujuk pada pengelola kegiatan Program Bimas Hindu yang berada di Satuan Kerja Bimas Hindu Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten yang berada di wilayah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta dan Banten. Representatif sebagai pemerintah dalam penelitian ini adalah orang yang berkedudukan paling tinggi dalam setiap Satuan Kerja, seperti Pembimas Hindu, Kepala Kemenag Kota/Kabupaten, atau Penyelenggara Bimas Hindu.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Persepsi

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu. Dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Banyak pengertian persepsi yang diketengahkan oleh berbagai ahli, masing-masing ahli memaknai sesuai disiplin keilmuannya. konsepsi mengenai persepsi itu sendiri seyogianya telah lama dikembangkan dalam

berbagai teori psikologi. dan suatu teori khusus mengenai persepsi yang cukup berpengaruh adalah teori atribusi.

Teori atribusi menurut saparinah (1976:52) adalah teori mengenai bagaimana orang membuat penjelasan kausal atau mengenai bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang dimulai dengan mengapa? Teori tersebut menekankan pada informasi yang dipergunakan orang dalam menarik kesimpulan kausal, dan apa yang dilakukan dengan informasi tersebut untuk menjelaskan pertanyaan kausal. Menurut Mulyana (2000:168) persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. selanjutnya mulyana mengemukakan persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lain. persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Robert A. Baron dan Paul B. Paulus, *Understanding Human Relations; A Practical Guide To People At Work*, 1991:34).

Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Faktor eksternal berupa lingkungan. kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang dikenal dengan komunikasi. persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. seperti dikatakan Krech (dalam Thoha, 2000:124) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataannya.

Dalam buku Mulyana (2000:167), John R. Wenburg dan William W. Wilmot menyampaikan persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna. Rudolph. F. Verderber mendefinisikan persepsi adalah

proses menafsirkan informasi inderawi. Sedangkan J. Cohen mengemukakan persepsi adalah sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang diluar sana. Persepsi ialah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru, dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi.

Menurut Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Gibson (1989) memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

Desiderato (1976) mengemukakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. persepsi ialah memberi makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. atensi (perhatian) adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah (Kenneth E. Anderson, 1972). Atensi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal penarik perhatian. Faktor eksternal penarik perhatian ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal. Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain: gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. sedangkan atensi yang disebabkan faktor internal penaruh perhatian adalah faktor-faktor biologis dan faktor-faktor sosio-psikologis.

Krech dan Crutchfield mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menentukan persepsi adalah persepsi bersifat selektif secara fungsional.

Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi adalah kerangka rujukan yang dimulai persepsi objek, kemudian persepsi sosial. Lebih lanjut Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1996) mengemukakan bahwa persepsi membantu individu dalam memilih, mengatur, menyimpan dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran dunia yang utuh dan berarti. oleh sebab itu, persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya, dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Senada dengan itu, Davidoff (1981) mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, nampak bahwa daya persepsi manusia mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, sementara itu Gito Sudarmo dan Sudita (2000) menyebutkan persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Winardi (1992) mengemukakan bahwa konsep persepsi merupakan proses kognitif, di mana seseorang individu memberikan arti pada lingkungan. mengingat bahwa masing-masing orang memberi artinya sendiri terhadap stimuli maka dapat dikatakan bahwa individu-individu yang berbeda, melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. lebih lanjut Winardi (1992) mengemukakan bahwa persepsi meliputi aktivitas menerima stimuli, mengorganisir stimuli tersebut, dan menerjemahkan atau menafsirkan stimuli yang terorganisir tersebut sedemikian rupa, sehingga ia dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Dalam kenyataannya persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan suatu pendataan yang benar dan objektif karena dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berlainan sehubungan dengan hal itu maka persepsi itu sebetulnya suatu proses Roucek (1987). Persepsi merupakan proses menyadari adanya sesuatu hal dan memberikan suatu tanggapan. Menurut Mulyana (2000) persepsi terbagi dua yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia). Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis. Persepsi terhadap manusia sering dijumpai persepsi sosial, meskipun kadang-kadang manusia disebut juga objek. perbedaan kedua tersebut, yaitu: (1) persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik,

sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan non verbal. orang lebih aktif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan; (2) persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan dan sebagainya).

Mulyana (2000) mendefinisikan persepsi sosial adalah sebagai proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya. Beberapa prinsip mengenai persepsi sosial sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana (2000), sebagai berikut:

- a. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian serupa
- b. Persepsi bersifat selektif. setiap manusia sering mendapat rangsangan indrawi sekaligus, untuk itu perlu selektif dari rangsangan yang penting. Untuk ini atensi suatu rangsangan merupakan faktor utama menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut.
- c. Persepsi bersifat dugaan. Persepsi bersifat dugaan terjadi oleh karena data yang kita peroleh mengenai objek lewat penginderaan tidak pernah lengkap. persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan.
- d. Persepsi bersifat evaluatif. persepsi bersifat evaluatif maksudnya adalah kadangkala orang menafsirkan pesan sebagai suatu proses kebenaran, akan tetapi terkadang alat indera dan persepsi kita menipu kita, sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas yang sebenarnya. untuk itu dalam mencapai suatu tingkat kebenaran perlu evaluasi-evaluasi yang seksama
- e. Persepsi bersifat kontekstual. Persepsi bersifat kontekstual merupakan pengaruh paling kuat dalam mempersepsi suatu objek. Konteks yang melingkungi kita ketika melihat seseorang, suatu objek atau sesuatu kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif

Persepsi pada masing-masing individu memiliki kecenderungan berbeda satu dengan yang lainnya. Pareek (1984:13) mengemukakan ada

empat faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi, yaitu:

- a. Perhatian terjadinya persepsi pertama kali diawali oleh adanya perhatian. Tidak semua stimulus yang ada di sekitar dapat ditangkap semuanya secara bersamaan. Perhatian biasanya hanya tertuju pada satu atau dua objek yang menarik bagi kita.
- b. Kebutuhan Setiap orang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan yang sifatnya menetap maupun kebutuhan yang sifatnya hanya sesaat, dimana masing-masing orang memiliki kebutuhan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya.
- c. Kesiapan Kesiapan adalah harapan seseorang terhadap suatu stimulus yang muncul, agar memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterima lebih efisien sehingga akan lebih baik apabila orang tersebut telah siap terlebih dahulu.
- d. Sistem Nilai Sistem nilai yang berlaku dalam diri seseorang atau masyarakat akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang.

2.3.2 Teori Kesiapan

Kesiapan berasal dari kata "siap" mendapat awalan ke- dan akhiran -an. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2003) kesiapan adalah suatu keadaan bersiap-siap untuk mempersiapkan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Psikologi, kata kesiapan diartikan sebagai "tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu" (Chaplin, 2006:419).

Slameto (2003) menjelaskan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi. Di lain pihak, Dalyono (2005: 52) juga mengartikan kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2008:94) kesiapan dijelaskan sebagai tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses

perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional. Hal yang kurang lebih sama diungkapkan Yusnawati (2007:11) yang menyatakan kesiapan sebagai suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill. Suharsimi Arikunto (2001:54), juga menyatakan kesiapan adalah suatu kompetensi berarti sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu.

Dari beberapa teori itu dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan dalam mempersiapkan diri baik secara mental, fisik, maupun materi selama melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sementara suatu kondisi akan dikatakan siap setidaknya-tidaknya mencakup beberapa aspek, yang menurut Slameto (2010:14) dikatakan ada tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan, yaitu:

- a. Kondisi fisik, mental, dan emosional
- b. Kebutuhan atau motif tujuan
- c. Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

Selanjutnya Slameto (2010:15) juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip *readiness* atau kesiapan, yaitu:

- a. semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).
- b. kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.
- c. pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan.
- d. kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.

Melanjutkan pendapat Slameto di atas, Notoadmodjo (2003) mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan individu, faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik

Karakteristik pada tiap individu meliputi: (1) Pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah untuk menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang diperkenalkan Nursalam, (2008); (2). Umur, semakin tua umur seseorang, maka pengalaman akan bertambah sehingga akan meningkatkan pengetahuannya akan suatu obyek (Notoatmodjo, 2003); dan (3) Pekerjaan, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, pencaharian (Purwadaminto, 2003). Jenis pekerjaan berpengaruh terhadap pembentukan kemampuan dan kemahiran, sehingga turut membantu menambah kemampuan dan kemahiran tersebut yang kita miliki.

b. Sosial Ekonomi

Status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya (Ralph Linton). Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Keadaan sosial ekonomi mempengaruhi faktor fisik, kesehatan dan pendidikan. Apabila faktor-faktor tersebut cukup baik, akan mengurangi beban fisiologis, psikologis.

c. Pengetahuan

Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2003), adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk tindakan seseorang.

2.3.3 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009: 134) dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Selanjutnya, M. Grindle menambahkan (Arif Rohman, 2009: 134), bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas “membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah”. Seperti tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau objek, penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, dan lain-lain.

Dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, seorang ahli yang bernama Charles O. Jones mendasarkan diri pada konsepsi aktivitasaktivitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: (1) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; (2) Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Arif Rohman, 2009: 135).

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah dibuat sebelumnya yang di dalamnya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif, faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Kesemuanya itu menunjukkan secara spesifik dari proses implementasi yang sangat berbeda dengan formulasi kebijakan pendidikan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas mengoperasikan sebuah program. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Persentase keberhasilan kebijakan dapat

dilihat dari aspek rencana sebesar 20%, keberhasilan implementasi 60%, sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.

Pelaksanaan/implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

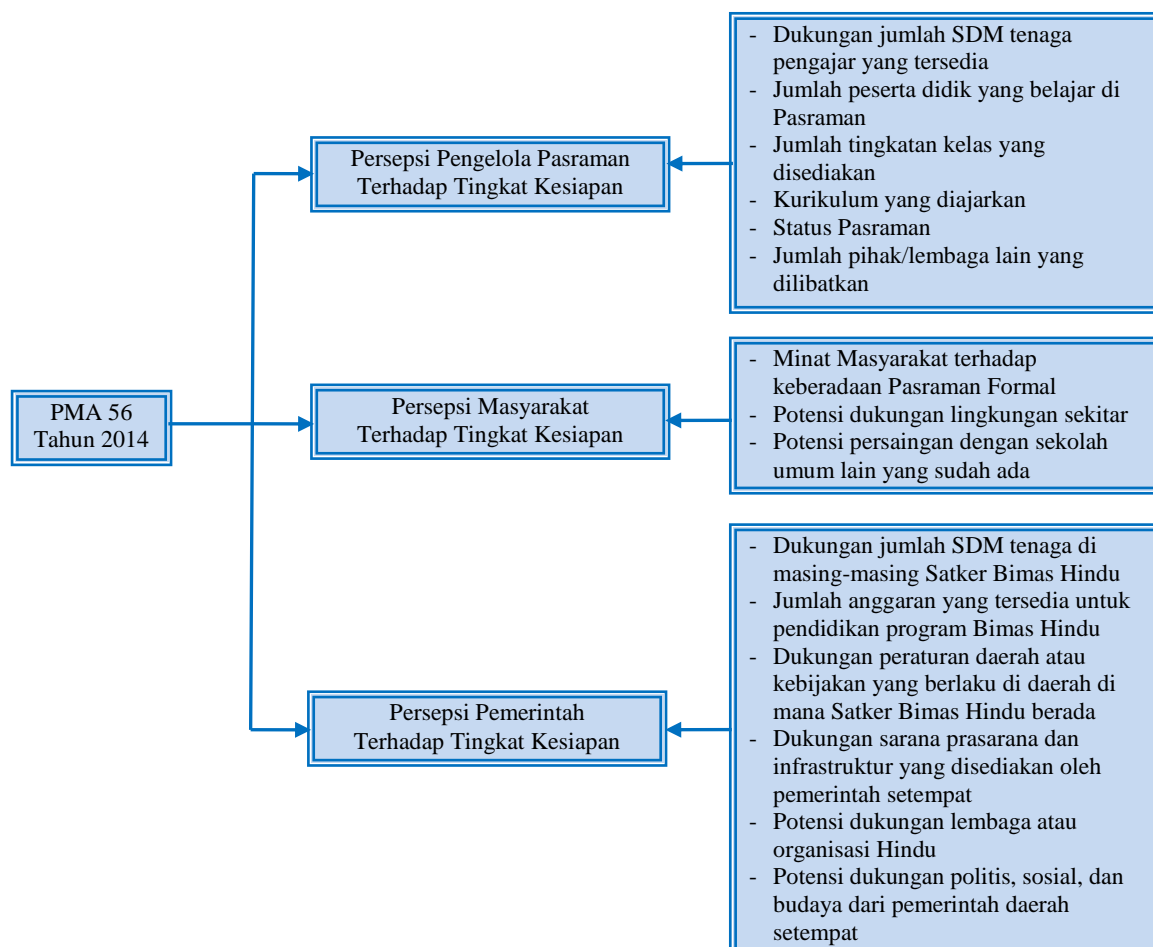
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kegagalan dan keberhasilan implementasi menurut Arif Rohman (2009: 147) ada tiga yaitu:

- a. Faktor pertama berkaitan dengan diktum atau rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan (decision maker). Menyangkut apakah rumusan kalimatnya jelas atau tidak, tujuannya tepat atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah difahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, terlalu sulit dilaksanakan atau tidak, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Oberlin Silalahi bahwa pembuat kebijakan harus terlebih dahulu mencapai beberapa konsensus diantara mereka mengenai tujuan-tujuan, serta informasi yang cukup untuk mencapai tujuan.
- b. Faktor kedua adalah pada personil pelaksananya. Menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan tersebut.
- c. Faktor ketiga adalah faktor organisasi pelaksana. Menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang diterapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

BAB III

MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS

3.1 Model Penelitian



Penjelasan atas model penelitian di atas dapat diawali dari keluarnya PMA 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu disambut baik oleh hampir semua masyarakat Hindu. Dengan keluarnya peraturan tersebut membuka kesempatan umat untuk menyelenggarakan pendidikan pasraman formal dari mulai Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, Utama Widya Pasraman, sampai dengan Maha Widya Pasraman. Hal baik ini tentu saja membutuhkan tingkat kesiapan yang baik pula untuk memulai penyelenggaraan sistem pendidikan tersebut.

Persepsi terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 ini tentu akan berbeda dari sudut pandang beberapa pihak, dalam hal ini pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini tergantung dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Untuk kelompok pengelola pasraman ingin coba diketahui bagaimana hubungan persepsi pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang diantaranya dukungan jumlah SDM tenaga pengajar yang tersedia, jumlah peserta didik yang belajar di pasraman, jumlah tingkatan kelas yang disediakan, kurikulum yang diajarkan, status pasraman, dan jumlah pihak/lembaga lain yang dilibatkan.

Untuk kelompok masyarakat ingin coba diketahui bagaimana hubungan persepsi masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang diantaranya adalah minat masyarakat terhadap keberadaan Pasraman Formal, potensi dukungan lingkungan sekitar, potensi persaingan dengan sekolah umum lain yang sudah ada. Untuk kelompok pemerintah ingin coba diketahui bagaimana hubungan persepsi pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang diantaranya adalah dukungan jumlah SDM tenaga di masing-masing Satker Bimas Hindu, jumlah anggaran yang tersedia untuk pendidikan program Bimas Hindu, dukungan peraturan daerah atau kebijakan yang berlaku di daerah di mana Satker Bimas Hindu berada, dukungan sarana prasarana dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah setempat, potensi dukungan lembaga atau organisasi Hindu, dan potensi dukungan politis, sosial, dan budaya dari pemerintah daerah setempat.

3.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis mayor penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- 3.2.1 Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kelompok pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2.2 Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kelompok masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2.3 Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kelompok pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskripsi korelasi dengan pendekatan *cross sectional* untuk mempelajari dinamika korelasi dengan pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2005). Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara persepsi Pengelola Pasraman, Masyarakat, dan Pemerintah terhadap keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan Tingkat Kesiapan Mengimplementasikannya.

Penelitian ini dilakukan terhadap pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah untuk menilai bagaimana tingkat kesiapan menyambut dikeluarkannya PMA 56 Tahun 2014 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesiapan tersebut tersebut. Tingkat kesiapan dapat dilihat berdasarkan persepsi pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah terhadap keluarnya PMA 56 Tahun 2014. Dari persepsi tersebut akan diambil kesimpulan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesiapan tersebut.

4.2. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi acuan terhadap hasil penelitian (Arikunto, 2005). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok yaitu kelompok pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah yang meliputi wilayah di Indonesia.

Jumlah umat Hindu di Indonesia tidak tersebar merata, sehingga dipilih beberapa provinsi yang merupakan kantong atau basis umat Hindu dari setiap bagian wilayah di Indonesia (dipilih secara *purposive sampling*). Provinsi-provinsi yang dipilih tersebut akan menjadi kerangka sample penelitian ini.

Provinsi-provinsi yang dipilih antara lain Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta dan Banten. Ketujuh provinsi yang disebut pertama adalah provinsi dengan jumlah umat Hindu terbanyak (Badan Pusat Statistik, 2010). Ditambahkannya provinsi DKI Jakarta dan Banten, peneliti anggap sebagai provinsi yang menjadi barometer perkembangan umat Hindu di Indonesia, sehingga total jumlah provinsi yang dipilih adalah 9 (sembilan) provinsi.

Dari kerangka sampling tersebut akan dipilih sample secara *stratified random sampling*, atau pemilihan sample dari masing-masing strata atau kelompok, yaitu kelompok pengelola pasraman, masyarakat, dan pengelola kebijakan di daerah (Bimas Hindu Daerah). Dari setiap kelompok tersebut dipilih sample secara *random* atau acak. Untuk kelompok pengelola pasraman akan dipilih sample sebanyak 100 responden. Untuk kelompok masyarakat akan dipilih sample sebanyak 500 orang. Sedangkan untuk kelompok pemerintah akan dipilih sample sebanyak 30 orang.

4.3. Jenis dan Sumber Data

- 4.3.1 Data primer meliputi data responden dari kelompok pengelola pasraman, masyarakat, dan pengelola kebijakan di daerah.
- 4.3.2 Data sekunder misalnya laporan-laporan atau dokumen yang berasal pasraman, Biro Pusat Statistik, Ditjen Bimas Hindu, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

4.4. Variabel Operasional

Adapun konsep penelitian ini adalah mengetahui persepsi pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah terhadap tingkat kesiapan terhadap dikeluarkannya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

- 4.4.1 Persepsi kelompok pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) pengelola pasraman mengenai tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 terkait dengan faktor yang mempengaruhinya.
- 4.4.2 Persepsi kelompok masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) masyarakat mengenai tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 terkait dengan faktor yang mempengaruhinya.
- 4.4.3 Persepsi kelompok pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) pengelola pasraman mengenai tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 terkait dengan faktor yang mempengaruhinya.

4.4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kelompok pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut:

a. Dukungan jumlah SDM tenaga pengajar yang tersedia.

Dukungan jumlah SDM tenaga pengajar yang tersedia berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar guru tetap dan tidak tetap yang bekerja di Pasraman, termasuk dengan jumlah pegawai administrasi ada.

b. Jumlah tingkatan kelas yang disediakan.

Jumlah tingkatan kelas yang disediakan berkaitan dengan kapasitas jumlah kelas yang disediakan untuk pembelajaran, mulai dari kelas setingkat PAUD, SD, SMP, sampai SMA.

c. Kurikulum yang diajarkan.

Kurikulum yang diajarkan yaitu berkaitan dengan jenis kurikulum yang diterapkan pada pasraman bersangkutan, apakah masih kurikulum KTSP, kurikulum 2013, atau kurikulum yang dibuat sendiri.

d. Status Pasraman.

Status pasraman yaitu berkaitan dengan status izin dan kepemilikannya, apakah berada di bawah naungan Parisada, Yayasan Swasta, atau swakelola masyarakat dan apakah telah memiliki izin pengelolaan dari Ditjen Bimas Hindu.

e. Jumlah pihak/lembaga lain yang dilibatkan.

Jumlah pihak/lembaga lain yang dilibatkan berkaitan dengan jumlah pihak/lembaga lain yang menaungi, mendampingi, atau bekerja sama dengan pasraman dalam hal pengelolaan, seperti Parisada, Institusi/Yayasan milik Pemerintah, Yayasan Swasta, atau Pihak/Lembaga Pendonor.

4.4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kelompok masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut:

a. Minat masyarakat terhadap keberadaan Pasraman Formal.

Minat masyarakat terhadap keberadaan Pasraman Formal berkaitan dengan dorongan atau keinginan masyarakat dalam hal ini orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di pasraman formal jika pasraman formal telah berdiri di lingkungan sekitarnya.

- b. Potensi dukungan lingkungan sekitar.
Potensi dukungan lingkungan sekitar yaitu asumsi dari masyarakat terhadap tingkat dukungan lingkungan sekitar terhadap keberadaan pasraman formal di lingkungan sekitarnya.
- c. Potensi kemampuan bersaing pasraman formal dengan sekolah umum lain yang sudah ada.
Potensi kemampuan bersaing pasraman formal dengan sekolah umum lain yang sudah ada yaitu asumsi dari masyarakat terhadap tingkat kemampuan bersaing pasraman formal jika sudah didirikan terhadap sekolah-sekolah umum lain dengan daya dukung yang sudah terbangun.

4.4.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kelompok pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dukungan jumlah SDM tenaga di masing-masing Satker Bimas Hindu
Dukungan jumlah SDM tenaga di masing-masing Satker Bimas Hindu yaitu berkait jumlah tenaga orang yang bekerja pada suatu Satuan Kerja, misalkan pada suatu Satuan Kerja Kantor Wilayah Kemenag Provinsi terdapat satu Pembimas, dua staf, dan dua tenaga pramubakti.
- b. Jumlah anggaran yang tersedia untuk pendidikan program Bimas Hindu.
Jumlah anggaran yang tersedia untuk pendidikan program Bimas Hindu, yaitu berkait jumlah anggaran atau pagu APBN yang dialokasikan pada suatu Satuan Kerja untuk kode anggaran 2142 (Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu). Dalam penelitian ini diambil alokasi anggaran untuk tahun 2015 sebagai representatif jumlah anggaran yang tersedia pada suatu Satuan Kerja.
- c. Dukungan peraturan daerah atau kebijakan yang berlaku di daerah di mana Satker Bimas Hindu berada.
Dukungan peraturan daerah atau kebijakan yang berlaku di daerah di mana Satker Bimas Hindu berada yaitu berkaitan dengan asumsi pengelola program Bimas Hindu pada masing-masing Satuan Kerja terhadap tingkat dukungan peraturan daerah atau kebijakan yang berlaku terhadap keberadaan Pasraman Formal di mana Satker Bimas Hindu bersangkutan berada.

- d. Dukungan sarana prasarana dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Dukungan sarana prasarana dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah setempat yaitu berkaitan dengan asumsi pengelola program Bimas Hindu pada masing-masing Satuan Kerja terhadap tingkat dukungan sarana prasarana dan infrastruktur terhadap keberadaan Pasraman Formal di mana Satker Bimas Hindu bersangkutan berada.

- e. Potensi dukungan lembaga atau organisasi Hindu.

Potensi dukungan lembaga atau organisasi Hindu yaitu berkaitan dengan asumsi pengelola program Bimas Hindu pada masing-masing Satuan Kerja terhadap tingkat dukungan lembaga atau organisasi Hindu terhadap keberadaan Pasraman Formal di mana Satker Bimas Hindu bersangkutan berada.

- f. Potensi dukungan politis, sosial, dan budaya dari pemerintah daerah setempat.

Potensi dukungan politis, sosial, dan budaya dari pemerintah daerah setempat yaitu berkaitan dengan asumsi pengelola program Bimas Hindu pada masing-masing Satuan Kerja terhadap tingkat dukungan politis, sosial, dan budaya dari pemerintah daerah setempat terhadap keberadaan Pasraman Formal di mana Satker Bimas Hindu bersangkutan berada.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

4.5.1 Instrumen penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Instrumen ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa instrumen yang digunakan dapat mewakili tujuan penelitian dan variabel-variabel yang akan diukur. Dalam penelitian ini terdapat tiga macam kuesioner yang akan disebarakan ke 3 (tiga) strata atau kelompok responden, yaitu kelompok pengelola pasraman, masyarakat, dan pengelola kebijakan di daerah.

Setiap kuesioner terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisi pernyataan mengenai data demografi responden. Bagian kedua berisi pernyataan mengenai persepsi responden terhadap keluarnya PMA 56

Tahun 2014, bagian ketiga berisi pernyataan mengenai tingkat kesiapan dalam implementasi regulasi tersebut.

Berikut penjelasan tentang instrumen pengumpulan data:

- a. Bagian A, berisi pernyataan mengenai data karakteristik responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Kuisisioner diisi oleh responden dengan mencantumkan tanda *check list* (√) pada pilihan jawaban yang tersedia.
- b. Bagian B, berisi pernyataan mengenai persepsi mengenai tingkat kesiapan responden terhadap keluarnya PMA 56 Tahun 2014, bersama dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kesiapan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner dikategorikan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan strata atau kelompok sample yang ada, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Pengelola Pasraman
 - Dukungan jumlah SDM tenaga pengajar yang tersedia
 - Jumlah peserta didik yang belajar di Pasraman
 - Jumlah tingkatan kelas yang disediakan
 - Kurikulum yang diajarkan
 - Status Pasraman
 - Jumlah pihak/lembaga lain yang dilibatkan
 - 2) Kelompok Masyarakat
 - Minat Masyarakat terhadap keberadaan Pasraman Formal
 - Potensi dukungan lingkungan sekitar
 - Potensi persaingan dengan sekolah umum lain yang sudah ada
 - 3) Kelompok Pemerintah
 - Dukungan jumlah SDM tenaga di masing-masing Satker Bimas Hindu
 - Jumlah anggaran yang tersedia untuk pendidikan program Bimas Hindu
 - Dukungan peraturan daerah atau kebijakan yang berlaku di daerah di mana Satker Bimas Hindu berada
 - Dukungan sarana prasarana dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah setempat

- Potensi dukungan lembaga atau organisasi Hindu
- Potensi dukungan politis, sosial, dan budaya dari pemerintah daerah setempat

4.5.2 Uji Coba Instrumen

Pengujian dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Soegiono, 2009).

a. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:154). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha α , karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, dimana untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha α . Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (Syaifuddin Azwar, 2000:3).

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tehnik *Formula Alpha Cronbach* dan dengan menggunakan program *SPSS 15.0 for windows*.

Rumus :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S^2_j}{S^2_x} \right)$$

Keterangan :

α = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item

Sj = varians responden untuk item I

Sx = jumlah varians skor total

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000:312) yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

Jika alpha atau r hitung:

1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik

2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik

b. Pengujian Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2002:144). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

Cara yang dipakai dalam menguji tingkat validitas adalah dengan variabel internal, yaitu menguji apakah terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan. Untuk mengukurnya menggunakan analisis butir. Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan cara skor-skor yang ada kemudian dikorelasikan dengan menggunakan Rumus korelasi *product moment* yang dikemukakan oleh Pearson dalam Arikunto, (2002: 146) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \left\{ \sum x \right\} \left\{ \sum y \right\}}{N} \\ = \frac{\sqrt{\left\{ \frac{\sum x^2 - (\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \frac{\sum y^2 - (\sum y)^2}{N} \right\}}}{N}$$

dengan pengertian:

r_{xy} : koefisien korelasi antara x dan y r_{xy}

N : Jumlah Subyek

X : Skor item

Y : Skor total

$\sum X$: Jumlah skor items

$\sum Y$: Jumlah skor total

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor total

(*Suharsimi Arikunto, 2002 : 146*)

Kesesuaian harga r_{xy} diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus diatas dikonsultasikan dengan tabel harga regresi moment dengan korelasi harga r_{xy} lebih besar atau sama dengan regresi tabel, maka butir instrumen tersebut valid dan jika r_{xy} lebih kecil dari regresi tabel maka butir instrumen tersebut tidak valid.

4.6 Metode Analisis Data

Pendekatan penelitian dapat dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian. Tahapan pendekatan penelitian ini, antara lain:

- 4.6.1 Melakukan pengumpulan data dan informasi, yang meliputi pengumpulan data primer yakni dengan penyebaran kuesioner maupun data sekunder sebagai pendukung dan dasar bagi kajian pustaka, serta penyusunan kerangka kuesioner, penentuan banyaknya kuesioner, dan sebaran kuesioner di wilayah penelitian;
- 4.6.2 Mengidentifikasi karakteristik pengguna pelayanan publik. Karakteristik jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lainnya;
- 4.6.3 Menentukan variabel-variabel yang berkemungkinan untuk mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Penentuan variabel dilakukan pada tinjauan pustaka dan berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu;
- 4.6.4 Mengetahui persepsi pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah terhadap keluarnya PMA 56 Tahun 2014 berkaitan dengan tingkat kesiapannya;

4.6.5 Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah menyambut dikeluarkannya PMA 56 Tahun 2014;

4.6.6 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi yang terkait dengan penelitian ini.

Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis hal-hal berikut, yaitu;

1) Persepsi pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut dikeluarkannya PMA 56 Tahun 2014; 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah terhadap dikeluarkannya PMA 56 Tahun 2014.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menyambut dikeluarkannya PMA 56 Tahun 2014 dapat dilakukan dengan analisis tabulasi silang/*crosstab* (nilai chi-square). Ada tidaknya hubungan tersebut dapat diketahui dari nilai chi-square. Maka, hipotesis yang diajukan yakni :

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kelompok pengelola pasraman, masyarakat, dan pemerintah terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kelompok pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi..

H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kelompok masyarakat terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi..

H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kelompok pengelola pasraman terhadap tingkat kesiapan menyambut keluarnya PMA 56 Tahun 2014 dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Pengambilan keputusan yang dapat dilakukan yakni:

a. Berdasarkan perbandingan Uji Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95 %.

Jika Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel, maka Ho diterima.

Jika Chi-Square Hitung > Chi-Square Tabel, maka Ho ditolak.

b. Berdasarkan nilai alpha.

Jika alpha hitung $> 0,05$, maka H_0 diterima.

Jika alpha hitung $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bansi, Pandit. 2005. *Pokok-Pokok Pikiran Agama Hindu dan Filsafatnya*, Surabaya: Paramita.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal, S. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jelantik Oka, Nyoman. 2009. *Sanatana Hindu Dharma*. Denpasar: Widya Dharma.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiloka, Sastra, Hukum, dan Seni*. Jakarta: Paradigma.
- Kadjeng, I Nyoman, dkk. 1991. *Sarasamuccaya dengan Teks Bahasa Sansekerta dan Jawa-Kuna*. Jakarta: Yayasan Dharma Sarathi.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Merodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Parbhasan, I Nyoman. 2009. *Panca Śraddhā* . Denpasar: Widya Dharma.
- Pendit, Nyoman, S. 1994. *Bhagavad-Gita*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- Puja, Gde, 2004, *Bhagavadgita*, Surabaya, Paramita.
- Pudja, Gede. 1999. *Theologi Hindu (Brahma Widya)*. Surabaya: Paramitha.
- Puja, Gde., Tjokordo Rai sudarta, 2010, *Manava Dharmasāstra*, Surabaya, Paramita.
- Titib, I Made. 2007. *Teologi Hindu (Brahmavidya): Studi Teks dan Konteks Eksistensi*. Surabaya: Paramita.